

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, KESULITAN SASARAN ANGGARAN, PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (Studi Pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan)

Reni Yulianti
Drs. H. Hardi, SH, MH, MM, Ak, CPA, CA
Drs. H. Rusli, MM, Ak, CA

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau

renireal@yahoo.com

ABSTRACT

This study aimed to determine the effect of budget goal clarity, budget goal difficulty, accounting control and reporting system to the accountability of local government institution in Pelalawan. This study used a survey method of work units in Pelalawan. The sample was 128 respondents. The population in this study was 32 offices in Pelalawan District on education. Type of the data was primary data with the method of data collection by using questionnaires. The method of data analysis in this study was multiple regression (multiple regression) by using software SPSS version 17.0.

Based on the results of simultaneous test showed that budget goal clarity, budget goal difficulty, accounting control and reporting system gave significantly affect to the accountability of government institution. The degree of influence of each independent variable on the dependent variable can be determined by doing partial test (t-test). The results showed that variable budget goal clarity, budget goal difficulty, accounting control and reporting system had a significant effect on performance accountability of government institution.

Key words: budget goal clarity, budget goal difficulty, accounting control, reporting system and performance accountability of government institution

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, bangsa Indonesia telah maju selangkah lagi menuju era keterbukaan. Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan-

badan pemerintah. Menurut undang – undang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) no 14 tahun 2008 menyatakan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-

Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (BPKP, 2011). Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya. Kinerja menurut Bastian (2006:274) adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan misi, dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu.

Anggaran merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan agar dapat melakukan pengendalian terhadap pencapaian tujuan organisasi dalam hal ini pemerintah daerah. Anggaran dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk menerjemahkan keseluruhan strategik dalam rencana dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya, mengingat pentingnya fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian dalam organisasi maka proses penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran perlu dilakukan agar dapat disesuaikan dengan tujuan anggaran (Philipus, 2009).

Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas,

aparat pelaksana anggaran juga akan terbantu dalam perealisasiannya, secara tidak langsung ini akan mempengaruhi terhadap kinerja aparat. Salah satu penyebab tidak efektif dan efisiennya anggaran dikarenakan ketidakjelasan sasaran anggaran yang mengakibatkan aparat pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penyusunan target-target anggaran (Chici, 2013).

Penelitian - penelitian mengenai pengaruh kejelasan sasaran anggaran pada sektor publik diantaranya Hilmi (2004) yang menunjukkan pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan hasil yang signifikan. Demikian juga, Mei Anjarwati (2012) yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun demikian terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian. Penelitian Netty (2011) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Istiyani (2009) membuktikan bahwa secara keseluruhan karakteristik tujuan anggaran termasuk didalamnya kesulitan tujuan anggaran secara signifikan mempengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah. Demikian juga penelitian Graffiratna (2009) menunjukkan bahwa tingkat kesulitan anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Sedangkan dalam hasil penelitian Nurul (2012) menyatakan bahwa kesulitan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Demikian juga penelitian Nopa (2013) mengatakan kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

Pengendalian merupakan suatu proses melalui mana manajemen suatu organisasi membuat keyakinan yang

beralasan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai misi dan rencana organisasi, pelaporan keuangan andal, dan kebijakan, hukum, dan peraturan yang relevan diikuti. Pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata dapat dilakukan apabila dilakukan pengendalian manajemen yang baik. Salah satu jenis pengendalian manajemen adalah pengendalian keuangan (*financial control*) dengan memanfaatkan sistem akuntansi (Darma, 2004).

Dalam penelitian Indraswari (2010) menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun demikian, penelitian Mei Anjarwati (2012) dan Netty (2011) mengatakan bahwa pengendalian akuntansi juga tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Untuk memantau dan mengendalikan kinerja atasan dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan diperlukan sistem pelaporan yang baik. Indraswari (2010) mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif, dan transparan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Mardiasmo (2009:161) berpendapat, laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.

Dalam penelitian Indraswari (2010), Netty (2011), dan Mei Anjarwati (2012) menunjukkan bahwa sistem pelaporan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun demikian terdapat ketidakkonsistenan dari hasil penelitian Risma (2009) yang menyatakan sistem pelaporan tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kebijakan yang ada pada daerah yang satu dengan daerah yang lain pasti berbeda, sehingga sasaran anggaran, pengendalian dan tingkat akuntabilitas suatu daerah juga berbeda. Kondisi tersebut yang mungkin terjadi di Kabupaten Pelalawan, dimana adanya pergantian kepala daerah pada Kabupaten tersebut. Berdasarkan Siaran Pers (2012) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Riau, Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 menyatakan bahwa:

“Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2011. Opini ini sama dengan opini yang diberikan BPK RI atas LKPD Tahun 2010 lalu. Tahun 2011, BPK RI menemukan permasalahan terkait kelemahan **Sistem Pengendalian Intern**, yaitu (1) Penatausahaan rekening milik bendahara pengeluaran belum tertib (2) Pengelolaan persediaan pada beberapa SKPD tidak tertib dan mutasi tambah kurang atas persediaan tidak tercatat; (3) Perencanaan, penggunaan, pembukuan, inventarisasi, pelaporan, pengamanan, pemeliharaan, dan penghapusan Aset Tetap pada Kabupaten Pelalawan tidak memadai; (4) Terdapat kesalahan pembebanan Belanja pada Belanja Modal Kabupaten Pelalawan. Selain itu, juga terdapat permasalahan lain terkait **ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.**”

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Netty (2011) dengan judul "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi". Hasil penelitian Netty menyatakan bahwa secara parsial variabel sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja, sedangkan variabel kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi memiliki pengaruh negatif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis mengangkat judul penelitian ini dengan judul "**Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan**".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan?
2. Apakah kesulitan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan?
3. Apakah pengendalian akuntansi anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan?
4. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten Pelalawan.
2. Untuk menguji pengaruh kesulitan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten Pelalawan.
3. Untuk menguji pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten Pelalawan.
4. Untuk menguji pengaruh sistem pelaporan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten Pelalawan.

2. Telaah Pustaka

2.1 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik (BPKP 2011).

Menurut Hilmi (2004) menyatakan bahwa dalam rangka menciptakan akuntabilitas kinerja, pemerintah daerah selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas aktivitas dan kinerja finansial kepada stakeholdernya. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu menjelaskan segala pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pencapaian target-target APBD dan kinerja keuangan (financial performance) secara terbuka, dapat dimengeti oleh masyarakat dan stakeholder lainnya.

2.2 Kejelasan Sasaran Anggaran

Kenis (Andarias, 2009) menyatakan kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku pegawai. Pelaksana anggaran akan menjadi bingung dan tidak puas dalam bekerja jika terdapat ketidakjelasan sasaran anggaran sehingga menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Kenis juga menyatakan bahwa anggaran tidak hanya sebagai alat perencanaan, pengendalian biaya dan pendapatan dalam pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi, sisi lain anggaran juga merupakan alat bagi manajerial SKPD untuk mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi kinerja dan memotivasi bawahannya.

2.3 Kesulitan Sasaran Anggaran

Kenis (Istiyani, 2009) menyatakan manajer yang memiliki tujuan anggaran yang terlalu ketat secara signifikan memiliki ketegangan kerja tinggi dan motivasi kerja rendah, kinerja anggaran, dan efisiensi biaya dibandingkan untuk anggaran memiliki tujuan anggaran tepat atau ketat tetapi dapat dicapai. Hal ini mengidentifikasi bahwa ketat tapi dapat dicapai adalah tingkat kesulitan tujuan anggaran. Menurut Graffiratna (2009) terdapat pemufakatan umum bahwa anggaran yang terlalu ideal (sangat ketat) adalah sulit dicapai sehingga dapat mengakibatkan para pelaksana tidak termotivasi untuk melaksanakan anggaran dan bahkan mungkin mereka menjadi frustrasi karena kemungkinan besar akan timbul penyimpangan yang tidak menguntungkan (*unfavorable*) dalam jumlah yang tinggi.

2.4 Pengendalian Akuntansi

Menurut Anthony (2005:3) pengendalian adalah suatu perangkat yang mengukur dan menilai apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dilakukan, sedangkan pengendalian akuntansi pada suatu organisasi adalah

untuk menjamin bahwa langkah-langkah penyusunan dan pencatatan telah dilakukan dan tercipta integritas finansial dari aktivitas-aktivitas organisasi.

Menurut Indaswari (2010) sistem pengendalian manajemen adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa aspek anak sistem yang saling berkaitan yaitu: pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban untuk mempengaruhi orang lain dalam sebuah perusahaan agar dapat mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Menurut Mardiasmo (2009:35) mengungkapkan fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Selain itu., dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan (*financial control*) dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi (*organization control*).

2.5 Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Hilmi, 2004). BPKP (2011) mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif dan transparan.

Di samping itu, perlu pula diperhatikan beberapa ciri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi, berdaya uji (*verifiable*), lengkap, netral, padat, dan terstandarisasi (untuk yang rutin).

3. Metode Penelitian

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Pelalawan, Propinsi Riau. Penelitian ini juga diarahkan pada objek Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu yang ada di Kabupaten Pelalawan.

3.2 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Pelalawan merupakan salah satu Kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Kampar, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999, dimana Pangkalan Kerinci sebagai Ibu Kota Kabupaten Pelalawan. Dengan ditetapkan Pangkalan Kerinci sebagai ibukota Kabupaten Pelalawan mulai berpacu mengejar segala bentuk ketertinggalan dan keterbelakangan yang selama ini menyelimuti segala sektor kehidupan.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemilihan sampel *nonprobabilitas* dengan *purposive sampling* yaitu dengan menyebarkan kuesioner pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu yang ada di Kabupaten Pelalawan.

3.4 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh instansi wajib Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan, provinsi Riau. Instansi wajib LAKIP yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dipilihlah 32 SKPD untuk dijadikan sampel.

3.5 Jenis Dan Sumber Data

3.5.1 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data berupa data subjek. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pelalawan. Kuesioner disebar ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi obyek penelitian.

3.5.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Pelalawan. Sumber data penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah memenuhi kriteria menjadi obyek penelitian.

3.6 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel

3.6.1 Kejelasan Sasaran Anggaran

Kenis (1979) dalam Andarias (2009) menyatakan kejelasan sasaran anggaran disengaja untuk mengatur perilaku pegawai. Pelaksana anggaran akan menjadi bingung dan tidak puas dalam bekerja jika terdapat ketidakjelasan sasaran anggaran sehingga menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Variabel kejelasan sasaran anggaran diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Abdul Halim (2002) dalam Netty (2011). Pernyataan ini diukur dengan menggunakan lima indikator variabel, yaitu pusat tanggung jawab, perencanaan, bidang kegiatan, produk, tingkat pengembalian, sasaran yang jelas, memudahkan tanggung jawab, sasaran dapat dimengerti, dan kebingungan akibat ketidakjelasan sasaran.

3.6.2 Kesulitan Sasaran Anggaran

Tujuan anggaran adalah range dari “sangat longgar dan mudah dicapai sampai sangat ketat dan tidak dapat dicapai”. Tujuan mudah dicapai gagal untuk memberikan suatu tantangan untuk partisipan. Dan memiliki sedikit pengaruh motivasi. Tujuan yang sangat ketat dan tidak dapat dicapai, mengarahkan pada perasaan gagal, frustrasi, tingkat aspirasi yang rendah, dan tujuan partisipan. Untuk melakukan pengukuran kesulitan anggaran menggunakan kuesioner yang diadopsi dari Kenis (Nopa, 2013).

Variabel kejelasan sasaran anggaran diukur menggunakan skala likert 1 sampai 5, dimana skor (1) menunjukkan rendahnya kejelasan sasaran anggaran dan skor (5) menunjukkan tingginya kejelasan sasaran anggaran (skor 1: sangat tidak setuju, skor 2: tidak setuju, skor 3: tidakpasti, skor 4: setuju, skor 5: sangat setuju).

3.6.3 Pengendalian Akuntansi

Menurut Indraswari (2010), bahwa sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sebagai sistem pengendalian yang berbasis akuntansi atau sistem pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Dalam hal ini yang termasuk pengendalian akuntansi adalah sistem perencanaan, sistem pelaporan dan prosedur monitoring yang didasarkan pada informasi.

Variabel pengendalian akuntansi diukur dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5, dimana skor (1) menunjukkan rendahnya pengendalian akuntansi dan skor (5) menunjukkan tingginya pengendalian akuntansi (skor 1: sangat tidak setuju, skor 2: tidak setuju, skor 3: tidakpasti, skor 4: setuju, skor 5: sangat setuju).

3.6.4 Sistem Pelaporan

BPKP (2011) mengemukakan, laporan yang baik adalah laporan harus disusun secara jujur, objektif dan transparan, selain itu dikatakan pula masih diperlukan prinsip-prinsip lain agar laporan keangan berkualitas. Variabel sistem pelaporan diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Anthony (Netty, 2011). Pernyataan ini diukur dengan menggunakan tiga indikator variabel, yaitu penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil, dan lamanya waktu koreksi.

Variabel sistem pelaporan diukur dengan menggunakan skala likert 1 sampai

5, dimana skor (1) menunjukkan rendahnya system pelaporan dan skor (5) menunjukkan tingginya system pelaporan (skor 1: sangat tidak setuju, skor 2: tidak setuju, skor 3: tidakpasti, skor 4: setuju, skor 5: sangat setuju).

3.6.5 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Lembaga Administrasi Negara (BPKP, 2011) memberikan pengertian, bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Variabel akuntabilitas publik diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Mardiasmo (Netty, 2011) dengan indikator pernyataan ini diukur dengan menggunakan indikator variabel, yaitu akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dengan skor 1 s/d 5 yaitu (1) Sangat Tidak Berhasil, (2) Tidak Berhasil, (3) Kurang Berhasil, (4) Berhasil, dan (5) Sangat Berhasil.

3.7 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu yang dilihat dari kriteria nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Imam Ghozali, 2011:19). Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian disajikan dalam tabel statistik deskriptif yang menunjukkan rata-rata standar deviasi atas bobot jawaban yang secara teoritis didesain dalam kuesioner dan kisaran sesungguhnya yaitu nilai terendah sampai nilai tertinggi atas bobot jawaban responden yang sesungguhnya.

3.8 Uji Kualitas Data

Ketetapan pengujian suatu hipotesa tentang hubungan variabel penelitian sangat tergantung pada suatu kualitas data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Ada dua uji kualitas data yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

a. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2009:172) dikatakan bahwa validitas merupakan terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

b. Uji Reliabilitas

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2009:173)

3.9 Analisis Data

3.9.1 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda, maka diperlukan pengujian asumsi klasik. Ada empat asumsi yang terpenting sebagai syarat penggunaan metode regresi (Wijaya, 2012). Asumsi tersebut adalah asumsi normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Pengujian ini perlu dilakukan karena adanya konsekuensi yang mungkin terjadi jika asumsi tidak bisa dipenuhi.

3.9.2 Analisis Regresi Linear berganda

Pengujian hipotesis pertama tentang Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) terhadap AKIP (Y). Kedua, tentang Kesulitan Sasaran Anggaran (X2) terhadap AKIP (Y). Ketiga, Pengaruh Pengendalian Akuntansi (X3) terhadap AKIP (Y). Keempat, Pengaruh Sistem Pelaporan (X4) terhadap AKIP (Y). Menggunakan koefisien korelasi yang dapat dilihat dalam persamaan berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

a = Konstanta

b_{1,2,3,4} = Koefisien Regresi Parsial
e = Variabel Pengganggu (error)
X₁ = Kejelasan Sasaran Anggaran
X₂ = Kesulitan Sasaran Anggaran
X₃ = Pengendalian Akuntansi
X₄ = Sistem pelaporan
Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.9.3 Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (R²) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Semakin besar koefisien determinasinya semakin baik variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian, persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen. Analisis determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Priyatno, 2013:120).

3.10 Pengujian Hipotesis

3.10.1 Uji Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2011:98).

Kriteria pengujian sebagai berikut:
Membandingkan antara F hitung dengan F tabel

- Bila f hitung < f tabel, variabel bebas secara serentak tidak berpengaruh terhadap variabel independen.
- Bila f hitung > f tabel, variabel bebas secara serentak berpengaruh terhadap variabel independen.

3.9.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji ini untuk menginterpretasikan koefisien variabel bebas (independen) yang dapat menggunakan unstandardized coefficients maupun standardized coefficients (Ghozali, 2011:101). Dengan membandingkan t hitung dengan t tabel yaitu bila t hitung > t tabel berarti bahwa variabel independen mampu mempengaruhi terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika t hitung < t tabel berarti bahwa variabel independen tidak mampu mempengaruhi terhadap variabel dependen.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Kuesioner Dan Demografi Responden

Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mendatangi 32 satuan kerja pemerintah kabupaten pelalawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari 128 kuesioner yang disebar, kuesioner yang kembali sebanyak 112 kuesioner (87.5 %) dan kuesioner yang tidak mendapat respon sebanyak 16 kuesioner (12.5%). Kuesioner yang dapat digunakan adalah sebanyak 112 kuesioner (87.5 %).

a. Statistik Deskriptif Variabel

Statistik deskriptif variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti tabel berikut:

Tabel 4.3 : Descriptive Statistics

	Min	Max	Mean	Std. Deviation	N
AKIP	23	36	27.1518	29.18	2.679
KSA	12	19	21.9107	15.41	1.763
KSLA	23	44	15.5000	32.99	5.208
PA	10	20	32.9911	14.38	3.191
SP	22	34	14.3839	27.15	3.174

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, dalam penelitian ini terdapat empat variabel independen yaitu kejelasan sasaran anggaran (X₁), kesulitan sasaran anggaran (X₂), pengendalian akuntansi (X₃) dan sistem pelaporan (X₄). Serta terdapat 1 variabel dependen yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). (X₁) mempunyai jumlah responden (n) sebanyak 112, nilai minimum adalah 23, nilai maximum adalah 36 dan nilai rata-rata (mean) adalah 29,18. (X₂) mempunyai jumlah responden (n) sebanyak 112, nilai minimum adalah 12, nilai maximum adalah 19 dan nilai rata-rata (mean) adalah 15,41. (X₃) mempunyai jumlah responden (n) sebanyak 112, nilai minimum adalah 23, nilai maximum adalah 44 dan nilai rata-rata (mean) adalah 32,99. (X₄) mempunyai jumlah responden (n) sebanyak 112, nilai minimum adalah 10, nilai maximum adalah 20 dan nilai rata-rata (mean) adalah 14,38. (Y) mempunyai jumlah responden (n) sebanyak 112, nilai minimum adalah 22, nilai maximum adalah 34 dan nilai rata-rata (mean) adalah 27,15.

4.2 Hasil Pengujian Kualitas Data

a. Hasil Pengujian Validitas Data

seluruh *item* pertanyaan baik pada variabel independen (kejelasan sasaran anggaran, kesulitan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan), maupun variabel dependen (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat bahwa semua *item* pertanyaan baik pada variabel independen maupun dependen bernilai $r_{hitung} > r_{tabel}$.

b. Hasil Pengujian Reliabilitas Data

Pada penelitian ini, uji reliabilitas untuk variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kejelasan sasaran anggaran, kesulitan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan semua pertanyaannya dinyatakan reliabel karena nilai dari *Cronbach Alphas* dari masing-

masing variabel lebih besar dari batas nilai *Cronbach Alphas* yaitu 0,6. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada lampiran.

4.3 Analisis data

4.3.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh pernyataan baik variabel independen (kejelasan sasaran anggaran, kesulitan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan), maupun variabel dependen (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) dinyatakan normal. Serta hasil uji multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi menunjukkan bahwa dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

4.3.2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut adalah tabel rangkuman hasil perhitungan regresi linear berganda menggunakan software SPSS 17.

Dari tabel diatas, maka hasil persamaan regresi berganda dapat ditentukan sebagai berikut :

$$Y = 1.686 + 0.169 X_1 + 0.886 X_2 + 0.118 X_3 + 0.208 X_4 + e$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta yang terbentuk adalah **1.686**. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai kejelasan sasaran anggaran, kesulitan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan dianggap konstan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah akan meningkat sebesar **1.686**.
2. Koefisien regresi kejelasan sasaran anggaran sebesar **0.169** dan bertanda positif, hal ini berarti bahwa setiap perubahan sebesar 1% kejelasan sasaran anggaran dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan menyebabkan meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebesar **0.169**.

3. Koefisien regresi kesulitan sasaran anggaran sebesar **0.886** dan bertanda positif, hal ini berarti bahwa setiap perubahan sebesar 1% kesulitan sasaran anggaran dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan menyebabkan meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebesar **0.886**.
4. Koefisien regresi pengendalian akuntansi sebesar **0.118** dan bertanda positif, hal ini berarti bahwa setiap perubahan sebesar 1% pengendalian akuntansi dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan menyebabkan meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebesar **0.118**.
5. Koefisien regresi sistem pelaporan sebesar **0.208** dan bertanda positif, hal ini berarti bahwa setiap perubahan sebesar 1% sistem pelaporan dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka akan menyebabkan meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sebesar **0.208**.

4.3.3 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

R Square (R²) sebesar 0,889 (89%), ini menerangkan bahwa pengaruh variabel kejelasan sasaran anggaran, kesulitan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten Pelalawan sebesar 89%. Atau variasi variabel bebas yang digunakan mampu menjelaskan sebesar 89% variasi variabel dependen. Sedangkan sisanya sebesar 11% menggambarkan variabel-variabel bebas lainnya yang tidak diamati dalam penelitian ini.

4.5 Pembahasan

Pengujian terhadap empat (hipotesis) yang diajukan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa ke empat hipotesis diterima. Pembahasan berikut ini bertujuan untuk menjelaskan secara teoritis dan

dukungan empiris terhadap hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan.

4.5.1 Hipotesis 1 (pertama) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesis pertama (H_1) dari penelitian ini adalah pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Hipotesis penelitian yang akan diuji yaitu:

H_0 : kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap AKIP.

H_1 : kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap AKIP.

Berdasarkan hasil pengujian pada variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1) dengan diperoleh t_{hitung} sebesar 2.416. Jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada signifikan $\alpha=5\%$ yakni sebesar 1.982. Dapat dilihat bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2.416 > 1.982$), artinya H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten pelalawan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mei Anjarwati (2012) yaitu kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Tegal dan Pemalang. Nurul Badriyah (2012) dalam penelitiannya yaitu kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Indraswari Kusumaningrum (2010) menyatakan variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi jawa tengah. Istiyani (2009) yang dalam penelitiannya menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja aparatur pemda kabupaten Temanggung. Dan dalam penelitian Hilmi Abdullah (2004) yaitu variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan

signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.5.2 Hipotesis 2 (kedua) Pengaruh Kesulitan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesis kedua (H_2) dari penelitian ini adalah pengaruh kesulitan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Hipotesis penelitian yang akan diuji yaitu:

H_0 : Kesulitan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap AKIP.

H_2 : Kesulitan sasaran anggaran berpengaruh terhadap AKIP.

Berdasarkan hasil pengujian pada variabel kesulitan sasaran anggaran (X_2) dengan diperoleh t_{hitung} sebesar 9,421. Jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada signifikan $\alpha=5\%$ yakni sebesar 1.982. Dapat dilihat bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($9,421 > 1.982$), artinya H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kesulitan sasaran anggaran (X_2) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di satuan kerja perangkat daerah kabupaten pelalawan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Istiyani (2009) yaitu, variabel kesulitan sasaran anggaran berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja aparatur pemda kabupaten Temanggung. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nopa Oktapia Manik (2013) dimana kesulitan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Badriyah (2012) yang menyatakan bahwa kesulitan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.5.3 Hipotesis 3 (ketiga) Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesis ketiga (H_3) dari penelitian ini adalah pengaruh pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP). Hipotesis penelitian yang akan diuji yaitu:

H_0 : Pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap AKIP.

H_3 : Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap AKIP.

Berdasarkan hasil pengujian pada variabel pengendalian akuntansi (X_3) dengan diperoleh t_{hitung} sebesar 3,121. Jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada signifikan $\alpha=5\%$ yakni sebesar 1.982. Dapat dilihat bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,121 > 1.982$), artinya H_0 diolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pengendalian akuntansi (X_3) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di satuan kerja perangkat daerah kabupaten Pelalawan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu Indraswari Kusumaningrum (2010) yang menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi Abdullah (2004) yang menyatakan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pemda Yogyakarta.

4.5.4 Hipotesis 4 (keempat) Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hipotesis keempat (H_4) dari penelitian ini adalah pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas keuangan

instansi pemerintah (AKIP). Hipotesis penelitian yang akan diuji yaitu:

H_0 : Sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap AKIP.

H_4 : Sistem pelaporan berpengaruh terhadap AKIP.

Berdasarkan hasil pengujian pada variabel sistem pelaporan (X_4) dengan diperoleh t_{hitung} sebesar 3,382. Jika dibandingkan dengan t_{tabel} pada signifikan $\alpha=5\%$ yakni sebesar 1.982. Dapat dilihat bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,382 > 1.982$), artinya H_0 ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pelaporan (X_4) berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten Pelalawan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mei Anjerwati (2012), yaitu sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah Tegal dan Pemalang. Dalam penelitian yang dilakukan Netty Herawaty (2011) variabel sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Jambi. Indraswari Kusumaningrum (2010) dalam penelitiannya variabel sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi Jawa Tengah, dan Hilmi Abdullah (2004) dengan variabel sitem pelaporan yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Yogyakarta.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian validitas data terhadap variabel independen (kejelasan sasaran anggaran, kesulitan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem

- pelaporan) dan variabel dependen (akuntabilitas kinerja pemerintah daerah) disimpulkan semua data valid.
2. Hasil pengujian data reliabilitas menunjukkan semua pernyataan dinyatakan reliabel karena nilai *Cronbatch Alpha* semua komponen variabel lebih besar dari 0.6
 3. Hasil pengujian normalitas data menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.
 4. Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan terbebas dari gangguan multikolinearitas, heterokedastisitas dan tidak terdapat autokorelasi.
 5. Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini didasarkan pada uji regresi secara parsial (uji t) dimana diperoleh t_{hitung} sebesar 2.416. Sedangkan, pada signifikan 5% ($\alpha=0,05$) maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1.982. Maka jika dibandingkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.416 > 1.982$). Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap AKIP.
 6. Hasil pengujian hipotesis kedua menemukan bahwa variabel kesulitan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini didasarkan pada uji regresi secara parsial (uji t) dimana diperoleh t_{hitung} sebesar 9.421. Sedangkan, pada signifikan 5% ($\alpha=0,05$) maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1.982. Maka jika dibandingkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($9.421 > 1.982$). Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kesulitan sasaran anggaran berpengaruh terhadap AKIP.
 7. Hasil pengujian hipotesis ketiga menemukan bahwa variabel pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah. Hal ini didasarkan pada uji regresi secara parsial (uji t) dimana diperoleh t_{hitung} sebesar 3.121. Sedangkan, pada signifikan 5% ($\alpha=0,05$) maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1.982. Maka jika dibandingkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.121 > 1.982$). Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa variabel pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap AKIP.

8. Hasil pengujian hipotesis keempat menemukan bahwa variabel sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini didasarkan pada uji regresi secara parsial (uji t) dimana diperoleh t_{hitung} sebesar 3.382. Sedangkan, pada signifikan 5% ($\alpha=0,05$) maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1.982. Maka jika dibandingkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3.382 > 1.982$). Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap AKIP.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. 2004. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kabupaten Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM
- Anjarwati, M. 2012. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. AAJ 1 (2) (2012). Universitas Semarang : Semarang.
- Anthony, N. R. 2005. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.
- Arifin, Johan, 2007. *Pengaruh Karakteristik Gaya Penyusunan Anggaran Terhadap*

- Efisiensi Biaya*, Sinergi Kajian Bisnis dan Manajemen Vol.9 No.1: 23-35.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2011, "Akuntabilitas Instansi Pemerintah". Bogor.
- Badriyah, N.2012. *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Evaluasi Anggaran Dan Umpan Balik Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial*. Skripsi fakultas Ekonomi universitas Riau.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Bangun, A. 2009. *Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang)*. Tesis. Medan: Sekolah Pasca sarjana Universitas Sumatra Utara, Medan.
- Christie, G. 2009. *Peran Partisipasi Anggaran, Tingkat Kesulitan Anggaran, dan Evaluasi Anggaran terhadap kinerja Manajerial pada PT. PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Surabaya Selatan*, Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Hal 1-9. Jawa Timur
- Darma, E. S.2004. "Pengaruh Kejelasan Sasaran dan Sistem Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi pada Pemerintah Daerah". Tesis. Yogyakarta: Program Pasca Sarjana UGM
- Ghozali, I. 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Badan. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Herawaty, N. 2011. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi*, Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Volume 13, Nomor 2, Hal. 31-36. Mendalo Darat : Jambi.
- Handayani, C. 2008. *Pengaruh Partisipasi dalam penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial SKPD dengan desentralisasi sebagai variabel Moderating*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Hanson, D.R dan M.M Mowen. 2005. *Akuntansi Manajemen*. 7. ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama*, BPFE, Yogyakarta.
- Istiyani, 2009. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Temanggung)*, Universitas Negeri Sebelas Maret. Surakarta.
- Kusumaningrum, I. 2010. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. Tesis. Prodi Magister Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro : Semarang.
- Manik, N. O, 2013. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan*. Skripsi fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Empat. Yogyakarta: Andi

- Munawar, Gugus Irianto dan Nurkholis, 2006. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap, dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang*, Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang, 23-26 Agustus 2006.
- Nafarin, M., 2007. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Nuraini.2012, *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Brebes*. Jurnal. Universitas Semarang.
- Priyatno, D. 2013. *Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS*. ANDI Yogyakarta : Yogyakarta.
- Ramandei, P. 2009. *Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah*. Jurnal Maksi, volume 10 : 55-73. Universitas Diponegoro : Semarang.
- Rohman, H. 2012. “*Akuntabilitas Penganggaran Publik Di Daerah*”. Lampung. Artikel Penelitian.
- Septiyani, A. 2010. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi ketiga belas. Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Suhartono, Ehrmann; Solichin, Mochammad, 2007. “*Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi*”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol. 08 No. 01, Jogjakarta.
- Wulandari, R. P. 2009. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- _____ *Undang – Undang RI No. 1 Tahun 2004.tentangPerbendaharaan Negara*
- _____ *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- _____ *Undang – Undang RI No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah*.
- _____ *Undang-undang RI No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*
- _____ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*

www.google.com.

www.pelalawankab.go.id